



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 12675-12684

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pemahaman Pajak dan Hambatan Pembayaran terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Bandung

Alfin Alwiansah¹, Rizky Firmansyah², Sanuri³

^{1,2,3}Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan

¹alfin.234020061@mail.unpas.ac.id, ²rizky.234020068@mail.unpas.ac.id, ³sanuri.234020054@mail.unpas.ac.id

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Keberhasilan sistem perpajakan, khususnya sistem self-assessment yang diterapkan di Indonesia, sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional masih menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak dan hambatan pembayaran pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain verifikatif. Populasi penelitian meliputi 50 pelaku UMKM di Kota Bandung yang seluruhnya dijadikan sampel melalui teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur dengan skala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap peraturan, perhitungan, serta prosedur pembayaran dan pelaporan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Sebaliknya, hambatan pembayaran pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pajak. Namun, secara simultan pemahaman pajak dan hambatan pembayaran pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini menegaskan bahwa faktor kognitif berupa pemahaman pajak memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan hambatan administratif dalam membentuk kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM perlu difokuskan pada peningkatan literasi dan pendampingan perpajakan secara berkelanjutan.

Kata kunci: kepatuhan pajak UMKM, pemahaman pajak, hambatan pembayaran pajak, self-assessment, literasi perpajakan

1. Latar Belakang

Pajak merupakan sarana inti dalam sistem keuangan negara yang berfungsi mendukung jalannya pembangunan dan fungsi pemerintahan. Efektivitas sistem perpajakan dalam menghimpun penerimaan negara dipengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Kepatuhan tersebut tidak hanya dipahami sebagai sekadar pemenuhan administratif, melainkan juga sebagai wujud perilaku wajib pajak yang mencerminkan kesadaran dan penerimaan terhadap kebijakan perpajakan [1].

Di Indonesia, sistem self-assessment bertanggung jawab pada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak dengan sendiri. Keberhasilan sistem tersebut bergantung pada wajib pajak yang dipahami serta kemudahan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian terbaru menegaskan bahwa sistem self-assessment dapat berjalan lancar jika wajib pajaknya mempunyai wawasan yang memadai tentang prosedur perpajakan [2].

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar bagi ekonomi negara, dengan menciptakan lapangan pekerjaan ataupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Akan tetapi tingkatan kepatuhan pajak UMKM relatif lebih minim dibandingkan dengan perusahaan besar. Kondisi ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak UMKM masih menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian [3].

Kepatuhan pajak UMKM mendapat pengaruh dari eksternal maupun internal. Faktor internal yang dominan adalah pemahaman pajak, meliputi wawasan pelaku UMKM tentang aturan, cara perhitungan, serta metode pembayaran dan pelaporan pajak. Wawasan yang luas diyakini mampu mengembangkan kesadaran maupun kepositifan terhadap pajak, sehingga memotivasi kepatuhan sukarela [4]. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dapat menimbulkan kesalahan administrasi dan menurunkan kepatuhan.

Selain itu, faktor eksternal berupa hambatan pembayaran pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM. Hambatan tersebut mencakup kendala teknis dalam penggunaan sistem pembayaran, keterbatasan akses terhadap teknologi informasi, serta kondisi keuangan usaha yang tidak stabil. Penelitian menunjukkan bahwa cara bayar yang berubah dan tingkatan penghasilan memengaruhi signifikan pada kepatuhan UMKM [5].

Ketidaksesuaian antara sistem administrasi pajak yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dengan kemampuan nyata UMKM dalam mengakses sistem tersebut berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan perpajakan. Maka dari itu, studi mengenai hambatan pembayaran pajak merupakan hal krusial dalam mendalami sejauh mana faktor struktural dan administratif mempengaruhi kepatuhan UMKM [6].

Sejumlah penelitian terbaru telah menyoroti pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan UMKM maupun faktor administratif terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi, mayoritas studi ini masih meneliti faktor-faktor tersebut secara terpisah. Studi empiris yang secara bersamaan menganalisis pengaruh pemahaman pajak dan hambatan pembayaran terhadap kepatuhan UMKM masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks UMKM perkotaan dengan perubahan ekonomi yang cepat [7]. Hal tersebut memperlihatkan terdapat celah penelitian yang tidak dapat kosong dengan meneliti secara lengkap.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain verifikatif, bertujuan menguji pengaruh pemahaman pajak dan hambatan pembayaran pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengujian hubungan antarvariabel secara objektif dan terukur melalui analisis statistik. Populasi penelitian mencakup seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kota Bandung, baik yang telah maupun belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan jumlah sebanyak 50 UMKM. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari sangat tidak setuju (skor 1) hingga sangat setuju (skor 5). Sebelum dilakukan analisis lanjutan, instrumen diuji validitasnya menggunakan korelasi item-total dan reliabilitasnya menggunakan koefisien Cronbach's Alpha dengan batas minimal 0,6.

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pemahaman pajak (X1), yang diukur melalui indikator pengetahuan tentang peran pajak, kewajiban perpajakan UMKM, ketentuan hukum pajak, perhitungan, serta pembayaran dan pelaporan pajak; serta hambatan pembayaran pajak (X2), yang mencakup kendala administratif, keterbatasan pemahaman, kondisi ekonomi, dan rendahnya kesadaran pajak. Variabel dependen adalah kepatuhan pajak UMKM (Y), yang diukur berdasarkan kedisiplinan pembayaran dan pelaporan pajak, ketepatan perhitungan, serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Teknik analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara simultan maupun parsial.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Hasil Analisis Data

3.1.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas diterapkan guna menilai apakah sebuah kuesioner dapat dianggap sah atau tidak. Pengujian signifikansi dilaksanakan dengan melakukan perbandingan nilai r hitung dan r tabel. Apabila nilai r untuk setiap item melebihi dari nilai r tabel dan nilainya positif, yaitu poin ataupun pernyataannya dinyatakan valid. Proses pengujiannya dilakukan dengan menerapkan pengujian dua sisi pada tingkat signifikansinya 0,05, serta hasilnya dilakukan perbandingan tabel r product moment, dan N (total respondennya) - 2.

Dalam penelitian ini, penulis menyusun 13 pernyataan dalam kuesioner yang disesuaikan pada indikator variabel yang diteliti, di antaranya pemahaman pajak, hambatan pembayaran, dan kepatuhan pajak. Selain itu, peneliti juga membagi kuesioner ke 50 responden yang menjadi sampel studi ini.

Berdasarkan penelitian ini, dengan sampel berjumlah 50 dan nilai r tabel pada tingkatan signifikansinya 5% yakni 0,2787, maka bisa ditarik simpulan nilai r hitung untuk masing-masing item instrumen kuesioner disebut valid.

$N - 2 = 50 - 2 = 48$

N = total responden

Angka r tabel yang tingkatan signifikansinya 2 arah 5% (0,05)

r tabel = 0.2787

Ketentuan:

- bila r hitung > r tabel artinya valid
- bila r hitung < r tabel artinya tidak valid

Variable X1 (Pemahaman pajak)

Tabel 4. Interpretasi X1

Instrumen Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	P (sig.)	Keterangan
pp.1	0,768	0.2787	0,001	Valid
pp.2	0,835	0.2787	0,001	Valid
pp.3	0,877	0.2787	0,001	Valid
pp.4	0,775	0.2787	0,001	Valid

Berdasarkan temuan dari pengujian validitas, semua item pertanyaan yang ada pada variabel Pemahaman Pajak (X1) memperlihatkan r-hitung yang bernilai melebihi r-tabel (0,2787). Hal tersebut membuktikan masing-masing indikator yang termasuk dalam variabel pemahaman pajak berkorelasi signifikan dengan nilai jumlah variabelnya tersebut.

Temuan ini mendukung studi dari Kurniawan et al. [8], yang menyebut untuk mengukur pemahaman pajak, harus ada hubungan kuat pada setiap item-item yang ada agar dapat dengan tepat mencerminkan tingkat literasi pajak dari pihak wajib pajak.

Variabel X2 (Hambatan Pembayaran Pajak)

Tabel 5. Interpretasi X2

Instrumen Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	P (sig.)	Keterangan
hpp.1	0,751	0.2787	0,001	Valid
hpp.2	0,876	0.2787	0,001	Valid
hpp.3	0,791	0.2787	0,001	Valid
hpp.4	0,844	0.2787	0,001	Valid

Hasil dari uji validitas memperlihatkan seluruh item yang ada dalam variabel Hambatan Pembayaran Pajak (X2) memiliki nilai r-hitung yang melebihi r-tabel (0,279). Hal tersebut memperlihatkan masing-masing indikator terkait hambatan dalam pembayaran pajak memegnaruhisignifikan dengan jumlah skor variabel tersebut.

Hasilnya ini serupa dengan temuan Ramdania [9] yang mengemukakan bahwa pengukuran mengenai hambatan perpajakan perlu mencerminkan berbagai aspek administratif agar relevan dalam analisis perilaku kepatuhan pajak.

Variable Y (Kepatuhan Pajak)

Tabel 6. Interpretasi Y

Instrumen Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	P (sig.)	Keterangan
kp.1	0,795	0.2787	0,001	Valid
kp.2	0,859	0.2787	0,001	Valid
kp.3	0,889	0.2787	0,001	Valid
kp.4	0,666	0.2787	0,001	Valid
kp.5	0,776	0.2787	0,001	valid

Berdasarkan analisis validitas, setiap item pertanyaan yang terkait dengan variabel Kepatuhan Pajak (Y) memperlihatkan r-hitung yang superior daripada dengan r-tabel (0,279). Hal tersebut membuktikan pertanyaan tersebut secara konsisten dapat mengevaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak, mencakup aspek pelaporan, pembayaran, dan kepatuhan terhadap aturan pajak.

Temuan tersebut serupa dengan temuan Judijanto [10], yang menekankan pentingnya mengukur kepatuhan pajak sebagai konstruk perilaku dengan indikator-indikator yang saling terhubung dan relevan terhadap praktik perpajakan.

Hasil pengujian validitas juga memperlihatkan seluruh poin pertanyaan mengenai variabel pemahaman pajak, hambatan dalam pembayaran pajak, serta kepatuhan pajak memiliki r-hitung yang bernilai melebihi r-tabel (0,279). Hal tersebut membuktikan masing-masing pernyataan dapat mengukur konstruksi yang dimaksud dengan akurat, sehingga semua instrumen penelitian disebut valid dan cocok untuk dianalisis secara lanjut. Hasilnya ini mendukung penelitian Faradina [11] dan Kumala [12] yang menyebut moral dan pemahaman pajak memengaruhi signifikan pada kepatuhan sukarela UMKM.

3.1.2 Uji Reliabilitas

Pada studi kuantitatif, instrumen dianggap mempunyai reliabilitas yang cukup jika nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60, karena angka ini menunjukkan konsistensi internal di antara pertanyaan yang digunakan untuk mengukur konstruksi yang sama. Ketika nilai Cronbach's Alpha berada di angka $\geq 0,60$, maka itu dijadikan tanda bahwa instrumen bisa dimanfaatkan dalam menganalisis secara lanjut, karena tingkatan konsistensi jawaban dari peserta sudah masuk dalam kategori yang dapat diandalkan secara statistik [13].

Temuan ini serupa dengan temuan di bidang perpajakan yang menyatakan bahwa sebuah variabel dianggap reliabel bila bernilai Cronbach's Alpha di atas 0,60, sehingga instrumen tersebut dianggap mempunyai kestabilan dan keandalan yang baik dalam menilai perilaku wajib pajak [14].

Dengan kriteria tingkatan reliabilitas sebagai berikut:

- 1) bila bernilai r hitung 0,8 – 1,0 artinya reliabilitas baik.
- 2) bila bernilai r hitung 0,6 – 0,799 artinya reliabilitas diterima.
- 3) bila bernilai r hitung kurang dari 0,6 artinya reliabilitas kurang baik.

Untuk kriteria umum nya yang sering dipakai untuk uji validitas adalah sebagai berikut:

Bila bernilai Alpha $> 0,6$ artinya instrumen reliabel atau konsisten

Bila bernilai alpha $< 0,6$ artinya instrumen tidak reliabel

Dalam penelitian ini tergambar nilai cronbach's alpha dari setiap variabel berikut hasilnya:

Tabel 7. Interpretasi Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
1	Pemahaman Pajak (X1)	0,828	0,700	Reliable
2	Hambatan Pembayaran Pajak (X2)	0,831	0,700	Reliable
3	Kepatuhan Pajak (Y)	0,859	0,700	Reliable

Berdasarkan temuan uji reliabilitas melalui metode Cronbach's Alpha, keseluruhan variabel pada penelitian memperlihatkan nilai Alpha yang melebihi 0,70, maka bisa dianggap sebagai reliabel. Ini mengindikasikan bahwa berbagai aitem pertanyaan pada setiap variabel mempunyai kekonsistenan internal yang memadai dan bisa melakukan pengukuran konstruk yang serupa dengan konsisten.

Secara statistik, Cronbach's Alpha bernilai di atas 0,70 menandakan bahwa respons dari peserta terhadap setiap item relatif konsisten dan tidak bersifat acak. Maka darinya, instrumen penelitian yang digunakan dalam penilaian pemahaman mengenai pajak, kendala untuk membyar pajaknya, serta kepatuhan pajak menjadi alat yang bisa dipercaya dan sesuai untuk analisis lebih lanjut, seperti dalam pengujian regresi dan pengujian hipotesis.

Hasil ini selaras dengan Ghozali [13] dan Rohayani & Irmawati [15], yang menyebut Cronbach's Alpha bernilai di atas 0,70 untuk semua konstruk membuktikan tingkatan reliabilitasnya diterima pada studi PLS-SEM', serta Syahrani [16], yang mengemukakan bahwa instrumen dianggap reliabel apabila Cronbach's Alpha melebihi 0,60 dan Composite Reliability melebihi 0,70. Hal ini menguatkan bukti mengenai konsistensi internal dari instrumen penelitian yang digunakan.

3.1.3 Uji Variabel Regresi Linier Berganda

Dalam pengujian variabel regresi linier berganda menjadi teknik statistik inferensial yang dimanfaatkan dalam memodelkan korelasi fungsional pada setiap variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebasnya secara simultan. Temuan ini bertujuan mengukur arah maupun besaran pengaruh setiap variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya, sekaligus melakukan prediksi nilai variabel bebas saat nilai seluruh variabel bebas telah diketahui. Dapat dilihat temuan pengujian regresi linier berganda dalam tabel di bawah:

Tabel 8. Output regresi linier berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,519	2,723		2,762	,008
Pemahaman Pajak	,772	,135	,641	5,719	,000
Hambatan Pembayaran Pajak	,018	,137	,015	,133	,895

Dependent Variable: Kepatuhan pajak

Dari temuan hitung regresi linier berganda dalam tabel tersebut terlihat persamaan regresi yakni: $Y = 7,519 + 0,772 X_1 + 0,018 X_2$

Yang dimana Y = Kepatuhan Pajak

a (constant) = 7,519

X₁ (Pemahaman pajak = 0,772

X₂ (Hambatan Pembayaran pajak) = 0,018

Berdasarkan persamaannya ini maka dijabarkan berikut:

- a. Konstanta bernilai 7,519 membuktikan jika pemahaman pajak “(X₁) dan hambatan dalam pembayaran pajak (X₂) dikatakan tidak berubah atau ada di angka nol, maka tingkat kepatuhan terhadap pajak berada pada angka 7,519.
- b. Hasil dari analisis regresi mengungkapkan pemahaman pajak berperan positif dan signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak, yang bernilai koefisien regresinya +0,772 serta signifikansinya 0,000. Hal tersebut membuktikan peningkatan dalam memahami pajak oleh wajib pajak bisa mengembangkan tingkatan kepatuhan pajak.
- c. Di sisi lain, hambatan dalam pembayaran pajak menunjukkan koefisien regresi positif +0,018, akan tetapi hasil tersebut tidak signifikan berdasarkan statistik (Sig. = 0,895), sehingga bisa disimpulkan bahwa hambatan pembayaran pajak tidak memengaruhi kepatuhan pajaknya

1. Uji asumsi klasik (Normalitas)

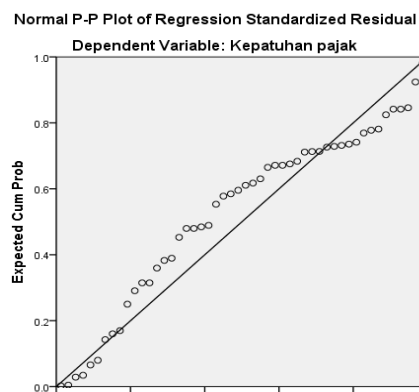
Uji normalitas yakni langkah bertujuan guna menentukan apakah data tersebar dengan simetris di sekitar rata-rata dan membentuk pola khas kurva lonceng yang mencirikan distribusi normal. Pada studi ini, metode yang diterapkan yakni Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan pendekatan Monte Carlo, serta P-P Plot Normal dari Residual Standar Regresi dan Histogram Residual Standar Regresi. Dasar mengambil keputusan, berdasarkan Ghozali [13], di antaranya:

- a) Ketika titik-titik berdistribusi di antara garis diagonalnya dan ikut keasar garis diagonalnya ataupun histogram yang memperlihatkan pola pendistribusian yang normal, maka model regresinya mencukupi syarat normalitasnya.
- b) Ghozali [13] menyatakan bahwa data dikatakan terdistribusi normal jika bernilai signifikansinya dari uji Kolmogorov-Smirnov melebihi 0,05, sehingga prinsip pengambilan keputusan serupa dapat diterapkan pada nilai signifikansi Monte Carlo yang dihasilkan oleh perangkat lunak statistik. Literatur statistik internasional juga menguraikan bahwa pendekatan Monte Carlo dalam uji Kolmogorov-Smirnov bertujuan untuk memperoleh estimasi nilai p yang lebih tepat, terutama pada ukuran sampel kecil hingga menengah, karena simulasi berulang dapat mengurangi bias. Menurut Ghozali [13], ketentuan untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan uji tepat Monte Carlo yakni bila Monte Carlo Sig. (2-tailed) > 0,05, berarti data residual berdistribusi normal (terima H₀); jika < 0,05, artinya datanya ini tidak normal (tolak H₀). Metode ini diterapkan pada sampel kecil atau data yang terikat di SPSS dengan interval kepercayaan 95-99%. Di bawah ini temuan analisis data melalui SPSS:

Tabel 9. Output Uji Normalitas (Kolmogrov-Smirnov Pendekatan Monte Carlo)

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,05626042
Most Extreme Differences	Absolute	,140
	Positive	,109
	Negative	-,140
Test Statistic		,140
Asymp. Sig. (2-tailed)		,016 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,259 ^d
	99% Lower Bound	,247
	Confidence Upper Bound	,270
	Interval	

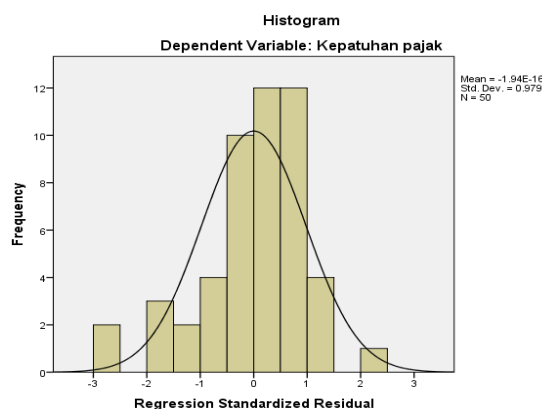
Hasil dari pengujian membuktikan nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) adalah 0,259, angka ini melebihi signifikansinya 0,05. Interval kepercayaan 99% berada di 0,247 sampai 0,270. Maka darinya, residual model regresi diindikasikan terdistribusi normal yang berarti asumsi normalitasnya telah dipenuhi. Oleh karenanya, model regresi linier berganda yang diaplikasikan pada studi ini bisa dipertimbangkan untuk dilakukan analisis lebih lanjut.



Gambar 1. Kurva Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Grafik Normal P-P Plot menunjukkan residual memiliki distribusi yang hampir mirip dengan terdistribusi normal, dikarenakan titik-titik yang ditampilkan ikut dengan garis diagonal. Hal tersebut membuktikan tidak adanya penyimpangan signifikan dari normalitas dalam residual model regresi.

Dari analisis grafik Normal P-P Plot serta Histogram Regression Standardized Residual, bisa ditarik simpulan residual dari model regresi berdistribusi normal. Maka dari itu, asumsi normalitas pada analisis regresi linier berganda sudah dipenuhi, sehingga model ini cocok untuk dimanfaatkan dalam pengujian hipotesis.



Gambar 2. Histogram Regression Standardized Residual

Histogram membentuk sebuah pola yang mirip dengan bentuk kurva lonceng. Histogram residual yang memperlihatkan pola mendekati distribusi normal dengan nilai rata-rata yang hampir nol menandakan bahwa residual memiliki distribusi normal. Tidak ada bukti adanya skewness atau kurtosis yang sangat tinggi.

Berdasarkan analisis grafik Normal P-P Plot dan Histogram Residual Standar Regresi, bisa ditarik simpulan residual dari model regresi mengikuti distribusi normal. Maka dari itu, asumsi normalitas pada analisis regresi linier ganda sudah dipenuhi, yang berarti model tersebut bisa dimanfaatkan dalam pengujian hipotesis.

2. Uji F / Anova

Uji simultan, yang disebut uji F, tujuannya guna mengenali pengaruh keseluruhan dari variabel bebas pada variabel terikat. Ghazali [13] menjelaskan bahwa uji F memiliki peran guna melakukan penilaian seluruh variabel bebas pada model regresi memberikan pengaruhnya bersama-sama pada variabel terikat, serta guna memberi penilaian sejauh mana model regresi tersebut sesuai (goodness of fit).

Uji F dilaksanakan melalui dua metode:

- a) Menurut nilai signifikansi (Sig.)
 - bila Sig. < 0,05 → model regresi signifikan
 - bila Sig. > 0,05 → model regresi tidak signifikan
- b) Menurut perbandingan Fhitung dan Ftabel
 - bila F Hitung > F Tabel → H₀ ditolak
 - bila Fhitung < Ftabel → H₀ diterima

Pengukuran pengujian simultan dilaksanakan melalui tabel anova yang menjadi temuan dari mengolah data melalui program SPSS disajikan berikut.

Tabel 16. Output Uji F / Anova

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	318,724	2	159,362	16,365	.000 ^b
	Residual	457,696	47	9,738		
	Total	776,420	49			

Dari data yang tersedia, dapat dilihat F-Hitung bernilai 16,365 yang tingkatan signifikansinya 0,000. Sementara itu, nilai F-Tabel adalah 3,195, yang menunjukkan bahwa F Hitung melebihi F Tabel, dan skor signifikansinya 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian, H₀ ditolak dan H₁ diterima. Ini menandakan bahwa pemahaman mengenai pajak dan batasan dalam melakukan pembayaran pajak memengaruhi signifikan pada kepatuhan pajak secara keseluruhan.

3. Model summary

Model Summary merupakan bagian dari evaluasi model regresi goodness of fit yang tujuannya mengevaluasi sebaik apa variabel independen bisa menerangkan variabel terikatnya. Ghazali [13] menyatakan bahwa Koefisien determinasi (R²) secara fundamental menghitung kapasitas model regresi untuk menerangkan variasi yang terjadi pada variabel bebas. Berikut ini adalah data model summary yang telah dianalisis menggunakan SPSS.

Tabel 10. Output Model summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.641 ^a	.411	.385	3,1206

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, didapatkan koefisien determinasi (R Square) yakni 0,411. Hal tersebut membuktikan 41,1% varian dalam kepatuhan pajak bisa diterangkan dua variabel, di antaranya pemahaman pajak dan hambatan dalam pembayaran pajak secara bersamaan, sementara 58,9% lainnya dipengaruhi berbagai faktor yang tidak ada pada model yang dianalisis. R Square tersebut mengindikasikan model ini berkemampuan prediksi secara baik, sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa nilai R Square antara 0,30 dan 0,50 adalah umum dan dapat diterima dalam penelitian mengenai perilaku kepatuhan pajak [17], [18].

4. Uji Parsial / T

Uji t dimanfaatkan guna menilai pengaruh setiap vairabel bebas secara terpisah terhadap variabel terikatnya, yang diasumsikan variabel bebas yang lain sellau dalam keadaan konstan. Ghozali [13] menyebut uji statistik t secara mendasar menunjukkan sebesar apa satu variabel bebas berkontribusi memberi penjelasan tentang varian dalam variabel dependen. Kriteria untuk membuat keputusan pada uji t di antaranya:

- Bila bernilai $t \text{ hitung} > t \text{ tabel} \rightarrow H_0 \text{ ditolak}$
- Bila bernilai signifikansi (Sig.) $< 0,05 \rightarrow H_0 \text{ ditolak}$

Keputusan dibuat dengan melakukan perbandingan nilai t yang dihitung dengan t tabel atau dengan mengevaluasi nilai signifikansinya. Ghozali [13]. Berikut adalah hasil perhitungan untuk uji parsial:

Tabel 11. Output Uji T / parsial

Model	t	Sig.
1 (Constant)	2,762	,008
Pemahaman Pajak	5,719	,000
Hambatan Pembayaran Pajak	,133	,895

Dengan t tabel yang memiliki nilai 1,678 dan signifikan pada tingkat 0,05, hasil uji t memperlihatkan pemahaman tentang pajak secara positif signifikan memengaruhi kepatuhan pajak dengan nilai signifikansi 0,000. Sebaliknya, hambatan dalam membayar pajak tidak memengaruhi signifikan kepatuhan pajak dikarenakan nilai signifikansinya 0,895". Hasilnya ini menandakan bahwa aspek kognitif mempunyai peran yang melebihi dibandingkan dengan aspek administratif dalam pembentukan kepatuhan pajak [13].

3.2 Pembahasan Hasil Penelitian

3.2.1 Pengaruh Pemahaman pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Studi ini membuktikan pemahaman mengenai pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak yang dipatuhi oleh UMKM di Kota Bandung, dengan koefisien regresi $\beta = 0,772$ dan bernilai signifikansinya 0,000 melebihi 0,05 (t-hitung 5,719 lebih besar dari t-tabel 1,678). Tingginya pemahaman pelaku UMKM tentang regulasi perpajakan, metode perhitungan pajak yang terutang, serta prosedur dalam pelaporan dan pembayaran pajak, akan memperbesar tingkatan kepatuhan pajak yang mereka lakukan secara sukarela.

Hasil tersebut serupa dengan temuan Siregar et al. [19] yang menemukan pengetahuan tentang pajak memengaruhi positif dan signifikan pada kepatuhan pajak UMKM di Medan. Lebih lanjut, Kurniawan et al. [8] menyimpulkan pemahaman terhadap pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, seseorang ataupun bersamaan. Secara teoretis, temuan ini mendukung teori kepatuhan sukarela yang menyebut wajib pajak cenderung lebih patuh ketika mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka. Pada konteks UMKM di Kota Bandung, rendahnya tingkat pemahaman pajak termasuk suatu hal yang menyebabkan fenomena wajib pajak yang tidak patuh yang diangkat dalam penelitian ini.

5.2.2 Pengaruh Hambatan Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Studi ini menunjukkan faktor penghambat untuk membayar pajak tidak memengaruhi signifikan pada tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung, yang koefisien regresi $\beta = 0,018$ dan tingkat signifikansi 0,895 melebihi 0,05 (t-hitung 0,133 kurang dari t-tabel 1,678). Hambatan administratif dan teknis, seperti kesulitan dalam mengakses e-billing, koneksi internet yang kurang stabil, atau keterbatasan dalam sistem pembayaran, tidak secara langsung mengurangi tingkat kepatuhan dari para wajib pajak UMKM.

Temuan ini serupa dengan Ramdania [9] yang menyebut implementasi sistem self-assessment tidak memengaruhi signifikan pada kepatuhan para wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tangerang Barat, karena sistem ini memerlukan kejujuran dan pemahaman mandiri yang sering kali tidak dimiliki oleh UMKM. Tampakonda et al. [20] menyebut meskipun terdapat tantangan teknis dalam e-filing dan e-billing, dampaknya terhadap kepatuhan UMKM tidak signifikan secara individual. Secara praktis, studi ini membuktikan faktor internal, misalnya pemahaman dan kesadaran mengenai pajak, lebih memengaruhi pelaku UMKM dibandingkan hambatan eksternal yang bersifat administratif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan regresi linier berganda, studi ini menyimpulkan pemahaman tentang pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kota Bandung, sedangkan hambatan dalam pembayaran pajak tidak memengaruhi signifikan secara terpisah pada kepatuhan pajak. Namun, baik pemahaman pajak maupun hambatan pembayaran pajak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, sehingga kedua faktor ini harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini membuktikan meningkatkan wawasan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai aturan, cara perhitungan, serta prosedur untuk membayar dan melaporkan pajak adalah hal penting untuk mendorong kepatuhan, sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Dilihat dari situasi awal, kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung masih merupakan masalah penting meskipun sektor ini memberikan kontribusi besar bagi perekonomian dan telah didukung oleh penerapan sistem penilaian mandiri serta modernisasi administrasi perpajakan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penyebab utama dari rendahnya kepatuhan lebih berkaitan dengan aspek kognitif, yaitu kurangnya pemahaman tentang pajak, sedangkan hambatan teknis dan administratif tidak selalu mengurangi kepatuhan apabila wajib pajak sudah memiliki tingkat literasi pajak yang baik. Dengan demikian, langkah pemerintah untuk mengatasi masalah rendahnya kepatuhan pajak UMKM perlu menjadi fokus pada peningkatan wawasan mengenai pajak dan pendampingan yang lebih intensif terhadap pelaku UMKM, serta memperbaiki layanan administrasi agar sistem perpajakan yang modern dapat diakses dan dimanfaatkan secara efektif oleh wajib pajak UMKM.

Referensi

- [1] F. Situmorang, "Analisis Kepatuhan Pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia," *JUMA*, vol. 1, no. 2, pp. 62–69, 2025, [Online]. Available: <https://e-journalbattuta.ac.id/index.php/juma/article/download/63/55/425>
- [2] A. A. Widodo and J. Sriwidodo, "Efektivitas Self Assessment System pada Pelaporan Pajak," *PALAR (Pakuan Law Rev.)*, vol. 09, no. 03, pp. 1–11, 2023, [Online]. Available: <https://e-journalbattuta.ac.id/index.php/juma/article/download/63/55/425>
- [3] L. M. Harahap, J. Situngkir, R. A. Wijaya, N. A. Simanungkalit, and A. I. Abdillah, "Peran Peran UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *PESTEL Manag. Mark. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 16–21, 2025, [Online]. Available: <https://ejournal.cendekiainsight.com/index.php/PESTEL/article/download/4/4/60>
- [4] U. L. Nisrina, "Pemahaman Perpajakan bagi Pelaku Usaha Kecil," *J. Kewirausahaan*, vol. 11, no. 3, pp. 185–190, 2025, [Online]. Available: <http://journal.stieamsir.ac.id/index.php/man/article/view/683>
- [5] K. W. Putri, A. Adriani, and R. Yuliani, "Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Perubahan Cara Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Proceeding Natl. Conf. Account. Financ.*, vol. 6, no. 1, pp. 52–61, 2024, [Online]. Available: <https://journal.uii.ac.id/NCAF/article/download/32784/16279/106938>
- [6] M. E. Palupi and J. Arifin, "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia: Faktor Internal dan Eksternal," *Proceeding Natl. Conf. Account. Financ.*, vol. 5, no. 1, pp. 336–346, 2023, doi: [10.20885/ncaf.vol5.art39](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39)
- [7] N. M. Siregar, M. Rizkina, N. Aliah, and V. A. Sitepu, "Literatur Riviu Terkait Kewajiban Perpajakan Pelaku UMKM di Indonesia," *JEMSI (Jurnal Ekon. Manaj. dan Akuntansi)*, vol. 10, no. 5, pp. 3041–3052, 2024, doi: [10.35870/jemsi.v10i5.3191](https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i5.3191)
- [8] C. L. Kurniawan, R. Septiawati, and A. Trisyanto, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM," *COSTING J. Econ. Bus. Account.*, vol. 7, no. 4, pp. 11411–11419, 2024, doi: <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11722>
- [9] A. Ramdania and D. Yoshida, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penerapan Self-Assessment System dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *AKSIOMA J. Sains Ekon. dan Edukasi*, vol. 2, no. 1, pp. 293–313, 2025, doi: <https://doi.org/10.62335/qjgnc48>
- [10] L. Judijanto and Al-Amin, "Kepatuhan Pajak dan Tata Kelola Perpajakan bagi UMKM di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Regulasi, Implementasi dan Tantangan," *JEBIMAN J. Ekon. Bisnis, Manaj. dan Akunt.*, vol. 3, no. 6, pp. 447–454, 2025, [Online]. Available: <https://sociohum.net/index.php/JEBIMAN/article/download/287/322>
- [11] F. Faradina, "A Simple Study of Tax Morale in Indonesia," *Direktorat Jenderal Pajak*, 2025. [Online]. Available: <https://pajak.go.id/id/node/115236>
- [12] R. N. Kumala, N. Oktaviono, H. F. R. Setiawan, L. Zulfiati, and Dahlifah, "Peran Tax Knowledge dalam Meningkatkan Tax Compliance: Bukti Empiris pada UMKM di Bandung," *Reviu Akunt. dan Bisnis Indones.*, vol. 8, no. 3, pp. 286–304, 2024, doi: <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i3.22604>
- [13] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021.
- [14] S. S. S. Nelwan, I. Elim, and S. Rondonuwu, "Implementasi E-Filing dan E-Billing terhadap Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Manado," *Bridg. J. Islam. Digit. Econ. Manag.*, vol. 2, no. 4, pp. 1–17, 2025, [Online]. Available: <https://journal.alshobar.or.id/index.php/bridging/article/download/374/277/1331>
- [15] R. M. Sari and Irmawati, "Analisis Pengaruh Gaya Hidup dan Kualitas Pelayanan terhadap Niat Pembelian Ulang Produk Makanan Cepat Saji di Kota Surakarta yang Dimediasi oleh Perilaku Konsumen," *Parad. J. Ilmu Ekon.*, vol. 8, no. 1, pp. 490–578, 2025, [Online]. Available: <https://journal.alshobar.or.id/index.php/bridging/article/download/374/277/1331>
- [16] H. Z. Syahrani and A. Maulidizen, "Pengaruh Atribut Produk dan Kepercayaan terhadap Keputusan Menabung Generasi Milenial di Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Purwakarta, Indonesia," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 10, no. 02, pp. 1860–1870, 2024, [Online]. Available: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/12853/5594>
- [17] V. Anggarani, Yudi, and Rahayu, "Pengaruh Struktur Modal Pertumbuhan Laba, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Laba," *J. Akunt. dan Keuang. Univ. Jambi*, vol. 10, no. 02, pp. 162–179, 2025, doi: [10.22437/jaku.v10i02.46487](https://doi.org/10.22437/jaku.v10i02.46487)
- [18] S. A. Marisa, R. Malahayati, and E. Jamaris, "Pengaruh Rasio Keuangan dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020–2024," *JIMU J. Ilm. Multi Disiplin*, vol. 03, no. 04, pp. 2004–2027, 2025, [Online]. Available:

- [19] <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/download/1319/999>
A. A. H. Siregar, N. N. Syahfitri, and R. R. Apriliani, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Sektor UMKM," *MENAWAN J. Ris. dan Publ. Ilmu Ekon. Ekon.*, vol. 3, no. 4, pp. 71–78, 2025, [Online]. Available: <https://journal.arei.or.id/index.php/MENAWAN/article/download/1537/1699/7596>
- [20] Y. Y. Tompatonda, H. Abubakar, and Thanwain, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan," *ACCESS J. Accounting, Financ. Sharia Account.*, vol. 3, no. 1, pp. 52–58, 2025, doi: [10.56326/access.v3i1.2659](https://doi.org/10.56326/access.v3i1.2659)